

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPAKALI DIUBAH DENGAN TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*kaltim.bpk.go.id*

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
2023



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 09 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9  
TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</li> <li>7. Keputusan Presiden Nomor 137 /P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ors. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</li> </ol>	
--	--	--

<p>sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;;</p>	<p>7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.</p>	
	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9)</p>	

	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini Yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;</li> <li>4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;</li> <li>6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur;</li> <li>7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dinas Daerah, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;</li> <li>b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;</li> <li>c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>d. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;</li> <li>e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;</li> <li>f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li> <li>g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>h. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;</li> </ol>	

<p>10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>12. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;</p> <p>16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p>	<p>i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;</p> <p>j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>k. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;</p> <p>l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;</p> <p>m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;</p> <p>n. Dinas pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;</p> <p>o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan</p> <p>p. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>q. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;</p> <p>r. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>s. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>t. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;</p> <p>u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>v. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan; dan</li> <li>w. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Polisi Pamong Praja) dan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kebakaran).</li> </ul> <p>2. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p>BAB II ASAS</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat Daerah Gubernur harus memperhatikan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;</li> <li>b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;</li> <li>c. efisiensi;</li> <li>d. efektivitas;</li> <li>e. pembagian habis tugas;</li> <li>f. rentang kendali;</li> <li>g. tata kerja yang jelas; dan</li> <li>h. h. fleksibilitas.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Badan daerah, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang Perencanaan;</li> <li>b. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;</li> <li>c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;</li> <li>d. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;</li> <li>e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;</li> <li>f. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;</li> <li>g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan</li> <li>h. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Dan pembangunan pemerintah Pusat.</li> </ul>	

	3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<b>BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH</b>		
Pasal 3	Pasal 8	
<p>1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.</p> <p>2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah;</li> <li>2. Sekretariat DPRD;</li> <li>3. Inspektorat;</li> <li>4. Dinas;</li> <li>5. Badan.</li> </ol> <p>3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Tipelogi Perangkat Daerah. berdasarkan Tipelogi Perangkat Daerah.</p>	<p>(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).</p> <p>(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.</p> <p>(3) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.</p> <p>(4) Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk satuan pendidikan formal.</p> <p>(5) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(6) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(7) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional.</p> <p>(8) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Rumah Sakit Daerah Provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.</p> <p>(9) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus dibentuk berdasarkan perundang-undangan ketentuan dan ditetapkan peraturan.</p>	
Bagian Kesatu Sekretariat Daerah	4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 4	Pasal 21	
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas :	(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :	

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I):       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah;</li> <li>2) Biro Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>3) Biro Hukum.</li> </ol> </li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Asisten II):       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biro Perekonomian;</li> <li>2) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya;</li> <li>3) Biro Administrasi Pembangunan.</li> </ol> </li> <li>3. Asisten Administrasi Umum (Asisten III):       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biro Organisasi;</li> <li>2) Biro Umum;</li> <li>3) Biro Humas.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ol> <p>(2) Pejabat yang menduduki jabatan saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
---	---	--

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dinas Daerah Provinsi</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;</li> <li>2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>4. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;</li> <li>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;</li> <li>6. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;</li> <li>7. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;</li> <li>8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;</li> <li>9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</li> <li>10. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;</li> <li>11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;</li> </ol>		

<p>12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;</p> <p>13. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;</p> <p>15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;</p> <p>16. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;</p> <p>17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;</p> <p>18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;</p> <p>19. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;</p> <p>20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;</p> <p>21. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan;</p> <p>22. Satuan Palisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (sub Pol PP) dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (sub Kebakaran).</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Badan Daerah Provinsi</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Badan Daerah Provinsi terdiri dari :</p> <p>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan;</p>		

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;</li> <li>3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;</li> <li>4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;</li> <li>5. Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe S melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;</li> <li>6. Sadan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe S melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan; dan</li> <li>7. Sadan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS</b></p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pada Dinas Daerah dan Sadan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).</li> <li>(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.</li> <li>(3) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatas terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.</li> <li>(4) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk satuan pendidikan formal.</li> <li>(5) UPT bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.</li> </ol>		

<p>(6) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan</p> <p>a. umum Daerah.</p> <p>(7) Rumah Sakit Daerah provinsi dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas Kesehatan.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(9) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(10) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPT yang baru.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBENTUKAN CABANG DINAS</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.</p> <p>(2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada sekretariat.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI</p>		

STAF AHLI		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.  (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administrative dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.  (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.  (4) Staf ahli gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.  (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli gubernur oleh gubernur.  (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembedangan dan tugas pokok dan fungsi staf ahli diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII KEPEGAWAIAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan..</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.  (2) Sekretaris DPRD Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, Kepala Badan Daerah Provinsi, dan Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.  (3) Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon II. b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.  (4) Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah Provinsi, Sekretaris Badan Daerah Provinsi, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.</p>		

<p>(5) Kepala Cabang Dinas Daerah Provinsi Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon III. b atau jabatan administrator.</p> <p>(6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas Daerah Provinsi Kelas B, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.</p> <p>(7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Kepala Subbagian pada Cabang Dinas Daerah Provinsi Kelas B dan Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan Daerah Provinsi Kelas B, serta Kepala Subbagian pada Satuan Pendidikan Provinsi merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.</p> <p>(9) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang berbentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.</p>		
<p>BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p>		
<p>BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya dengan beberapa penyesuaian nomenklatur sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <p>(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Perangkat Daerah Sekretariat Korpri merupakan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan Sekretariat Korpri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Gubernur tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur RSUD sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> </ol> <p>Tetap melaksanakan fungsi dan urusannya sampai dengan terbentuknya urusan yang membidangi berdasarkan peraturan perundang-undangan,</p> <p>(2) Pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Tahun 2016.</p> <p>(3) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada minggu ke empat bulan Desember Tahun 2016.</p>		
<b>BAB XI</b>		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> </ol>		

<p>c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</p> <p>e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Peraturan Daerah ini dapat ditinjau Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>		
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>	
<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 22 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR</p>	

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 22 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ttd DR. H. RUSMADI	Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 SEKRETARIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd SRI WAHYUNI	
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9.	LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2.	
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (9/316/2016)	NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2-102/2023).	
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,  <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006	Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA KEPALA BIRO HUKUM  <u>SUPARMI.</u> NIP. 19690512 198903 2 009	